

Auditing

Suatu Pengenalan

Edisi Pertama

Siti Maria Wardayati

KATA PENGANTAR

EDISI PERTAMA

Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Profesional Akuntan Publik telah menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per 1 Januari 2001 sebagai wujud respon dari profesi akuntan publik dalam memasuki lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kompetitif, dan turbulen.

Berbagai standar yang dirumuskan dalam SPAP akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat jika keseluruhan anggota Kompartemen Akuntan Publik membangun komitmen dan kompetensi mereka dalam mewujudkan standar tersebut ke dalam pekerjaan profesional mereka.

Buku *Auditing – Suatu Pengenalan* ini disusun dengan tujuan menambah bacaan mengenai pemeriksaan oleh akuntan publik, dimensi keprofesionalannya, dan ikut menyemarakkan ulang tahun Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang ke 40 tahun.

Buku ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari Pendahuluan, Kantor Akuntan Publik, Standar Auditing, Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan, dan Profesionalisme Dalam Pengauditan. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mata kuliah Auditing.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya terhadap Prof. Dra. Sri Surani, M.Sc atas koreksi penggunaan tata bahasa Indonesia yang benar, Sdr. Sundari dan Roro yang telah banyak membantu pengetikan buku ini, dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis persembahkan buku ini untuk keluarga yang terkasih: HM. Iswinarso, Viera, Ryan, Dhani, dan Ayah Ibuku tercinta yang banyak memberikan dukungan moril.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Jember, Agustus 2004

Penulis,

Dra. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak
Akuntan, Reg. Neg. No. D-9022

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Setiap dosen, baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menyumbangkan karya ilmiah dalam bentuk tulisan-tulisan di majalah ilmiah, seminar maupun penulisan buku tulis.

Oleh karena itu kami menyambut gembira atas hadirnya karya ilmiah Saudari Dra. Siti Maria Wardayati, Ak., M.Si yang telah menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember sejak 1 April 2002, untuk menulis buku Auditing dengan judul "**Auditing - Suatu Pengenalan**". Selain itu karya ilmiah ini ditulis, untuk ikut menyemarakkan ulang tahun Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang ke 40 tahun. Mudah-mudahan hal ini bisa menggugah dan mendorong dosen-dosen lainnya untuk mulai menulis karya ilmiah yang merupakan salah satu cara pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kami percaya buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan akademik dan dapat memicu serta memacu para akademis lainnya dalam penerbitan buku-buku ilmiah sebagai wujud peran serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Jember, 5 Agustus 2004

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Drs. H. LIAKIP, SU

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Auditing dan Lingkungannya.....	1
1.2 Auditing dan Akuntansi.....	3
1.3 Definisi Auditing.....	4
1.4 Tujuan Audit.....	7
1.5 Jenis-Jenis Audit.....	9
1.6 Jenis-Jenis Auditor.....	11
BAB II KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
2.1 Struktur Organisasi dan Bentuk Hukum.....	13
2.2 Jasa yang Diberikan	14
2.2.1 Jasa Atestasi.....	15
2.2.2 Jasa Non Atestasi	17
2.3 Jenis-Jenis Pendapat Akuntan Publik	18
2.2.1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>).....	18
2.2.2 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Standar (<i>Unqualified Opinion With Explanatory Language</i>).....	19
2.2.3 Pendapat Wajar dengan Pengecual (<i>Qualified Opinion</i>).....	20
2.2.4 Pendapat Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)	20
2.2.5 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer of Opinion</i>).....	21
BAB III STANDAR AUDITING	
3.1 Standar Auditing.....	23
3.1.1 Standar Umum.....	24
3.1.2 Standar Pekerjaan Lapangan	27
3.2 Bukti Audit.....	33
3.3 Risiko Audit dan Materialitas	40
BAB IV LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
4.1 Contoh Opini Laporan Auditor Independen.....	43
4.2 Contoh Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan.....	51

BAB V PROFESIONALISME DALAM PENGAUDITAN

5.1	Profesional dan Standar Auditing	63
5.2	Profesional dan Standar Pengendalian Mutu	64
5.3	Profesional dan Dimensinya	65
5.4	Profesional dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.....	66
5.5	Profesional dalam Penelitian Unit Observasi Akuntan Publik	68
5.6	Profesional dan Peristiwa yang Meragukannya.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 AUDITING DAN LINGKUNGANNYA

Profesi akuntan publik memasuki lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kompetitif, dan turbulen. Dalam lingkungan seperti itu, kebutuhan masyarakat mengalami perubahan pesat, serentak, radikal, dan pervasif. Tuntutan masyarakat atas jasa profesi akuntan publik juga mengalami perubahan sejalan dengan kepesatan, keserentakan, keradikalan, dan kepervasifan perubahan lingkungan tersebut (IAI, SPAP, 2001:xiii).

Kemampuan melakukan pengamatan terhadap *trend* perubahan dan kecepatan tanggap (*responsiveness*) profesi akuntan publik terhadap perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat dijabarkan dalam bentuk penyempurnaan dan pengembangan berbagai standar profesional akuntan publik yang dikenal dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kemampuan untuk berubah sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan bisnis menjadi penentu keberhasilan profesi akuntan publik dalam menjaga agar jasa yang disediakan bernilai tambah (IAI, SPAP, 2001:xvi).

Profesi akuntan publik memiliki peran kunci dalam penyediaan informasi keuangan yang andal bagi pemerintah dan masyarakat bisnis. Pemerintah memerlukan informasi keuangan yang andal untuk perencanaan dan pengendalian pengeluaran pemerintah serta untuk dasar penentuan pajak yang menjadi kewajiban masyarakat. Masyarakat bisnis juga memerlukan informasi keuangan yang andal untuk dasar pengambilan keputusan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif, serta untuk pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya kepada investor, kreditur, dan berbagai pihak berkepentingan yang lain (IAI, SPAP, 1994:ix).

Kunci untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan profesi akuntan publik bagi masyarakat pemakai jasa yaitu perubahan keberdayaan profesi akuntan publik yang sejalan dengan *trend* perubahan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Keberdayaan tersebut ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) kemampuan profesi akuntan publik untuk melakukan pengamatan terhadap *trend* perubahan di masa depan, (2) kapabilitas akuntan publik untuk menjalankan berbagai persyaratan

yang dituntut oleh masyarakat pemakai jasa ke dalam standar profesional, dan (3) komitmen dan kompetensi anggota Kompartemen Akuntan Publik dalam mewujudkan berbagai standar profesional dalam penyediaan berbagai jasa (IAI, SPAP, 2001:xiv).

Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan SPAP sebagai respon dari ketiga faktor tersebut. SPAP 2001 merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973 yang membahas: (1) standar auditing, (2) standar atestasi, (3) standar jasa akuntansi dan *review*, (4) standar jasa konsultasi, (5) standar pengendalian mutu, dan (6) aturan etika kompartemen akuntan publik.

Kelima tipe standar profesional yang pertama merupakan standar teknis yang diterbitkan Dewan SPAP. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan aturan moral yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik. Keenam tipe standar profesional tersebut disusun untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat.

Penerbitan Standar Profesional Akuntan Publik tersebut sejalan dengan standar auditing yang berlaku universal atau prinsip-prinsip standar profesional internasional yang terdapat dalam *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). GAAS menjelaskan tiga prinsip utama standar umum, tiga prinsip utama standar pekerjaan lapangan, dan empat prinsip dasar standar pelaporan (Whittington & Pany, 2001:34-35, Arens, et.al., 2003:32-34). Selain mengadopsi dari GAAS, SPAP juga berpedoman pada standar audit dari *International Auditing Standard* (IAI, SPAP:001.6).

Standar Profesional Akuntan Publik disusun untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai acuan praktik profesi akuntan publik Indonesia. Berbagai standar yang dirumuskan dalam SPAP akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat jika keseluruhan anggota Kompartemen Akuntan Publik membangun komitmen dan kompetensi mereka dalam mewujudkan standar tersebut ke dalam pekerjaan profesional mereka (IAI, SPAP, 2001:xiv).

Selain itu, keefektifan berbagai standar yang tercantum dalam SPAP sangat ditentukan oleh pemahaman dan kepatuhan anggota profesi akuntan publik terhadap aturan yang digariskan dalam standar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan yang berkelanjutan atas pemahaman para anggota profesi akuntan publik atas berbagai standar yang dikodifikasi dalam SPAP. Di samping itu kepatuhan mereka terhadap berbagai standar yang telah ditetapkan oleh IAI merupakan suatu keharusan untuk

menjaga dan mengembangkan mutu jasa profesi akuntan publik yang disediakan bagi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan yang dicantumkan dalam SPAP memiliki kekuatan yang mengikat dan bersifat *mandatory* bagi anggota IAI yang berpraktek sebagai auditor independen.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam SPAP (IAI, SPAP:2001.1).

Seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor, akan memberikan jasa atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya diantaranya membuat laporan mengenai *internal control*, dan laporan keuangan prospektif. Jenis jasa *assurance* yang sedang dikembangkan adalah jasa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan, seperti: klien meminta akuntan publiknya untuk mengevaluasi keandalan sistem informasinya, atau menilai kecukupan dari sistemnya untuk mengelola risiko bisnis, atau menilai efektifitas dari sistem pengukuran kinerja (Konrath, 2002:4). Oleh karena itu auditing merupakan suatu bentuk atestasi yang merupakan suatu bentuk *assurance*.

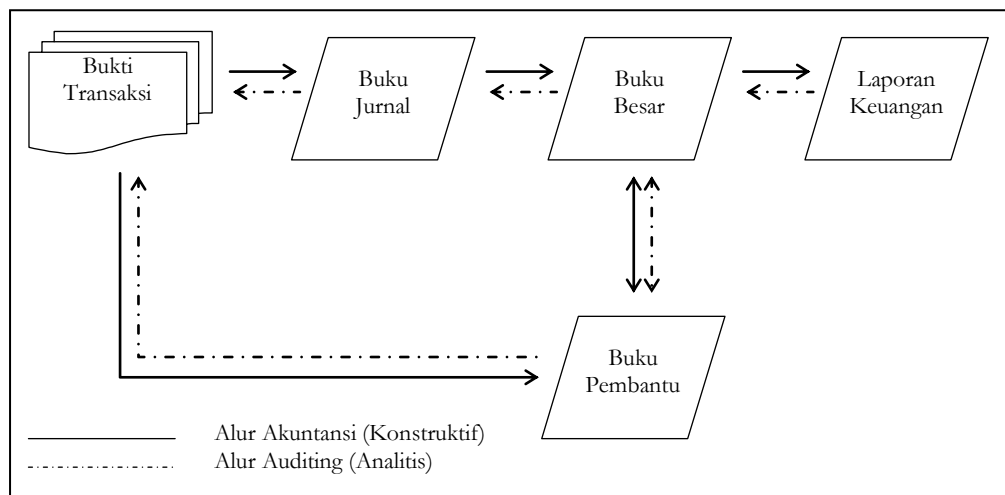
1.2 AUDITING DAN AKUNTANSI

Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Dari uraian diatas dapat diketahui perbedaan signifikan antara proses auditing dengan proses akuntansi. Perbedaan auditing dan akuntansi dapat dilihat dari segi metode dan tujuan. Metode auditing mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti yang berhubungan dengan asersi manajemen. Metode akuntansi mencakup pengidentifikasian transaksi atau kejadian yang mempengaruhi entitas (perusahaan). Setelah

diidentifikasi, item tersebut diukur, direkam atau dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas dalam catatan akuntansi. Laporan auditor independen merupakan hasil akhir auditing dan laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Auditing tidak menciptakan informasi baru, tetapi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Auditing menguraikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran penyajian informasi tersebut. Sedangkan tujuan akuntansi adalah mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditing mempunyai struktur yang bersifat analitis dan akuntansi mempunyai struktur yang bersifat konstruktif seperti pada Gambar 1.1.



Sumber: Abdul Halim (1997:56)

Gambar 1.1. Proses Auditing dan Akuntansi

Auditing khususnya *financial audit* dilakukan oleh akuntan publik yang independen dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Akuntansi (*accounting*) pada umumnya dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1.3 DEFINISI AUDITING

Terdapat banyak definisi auditing yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti: Arens et. al. (2003:11) mendefinisikan:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Sedangkan Whittington et. al. (2001:4) mendefinisikan:

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting record and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making inquiries within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited.”

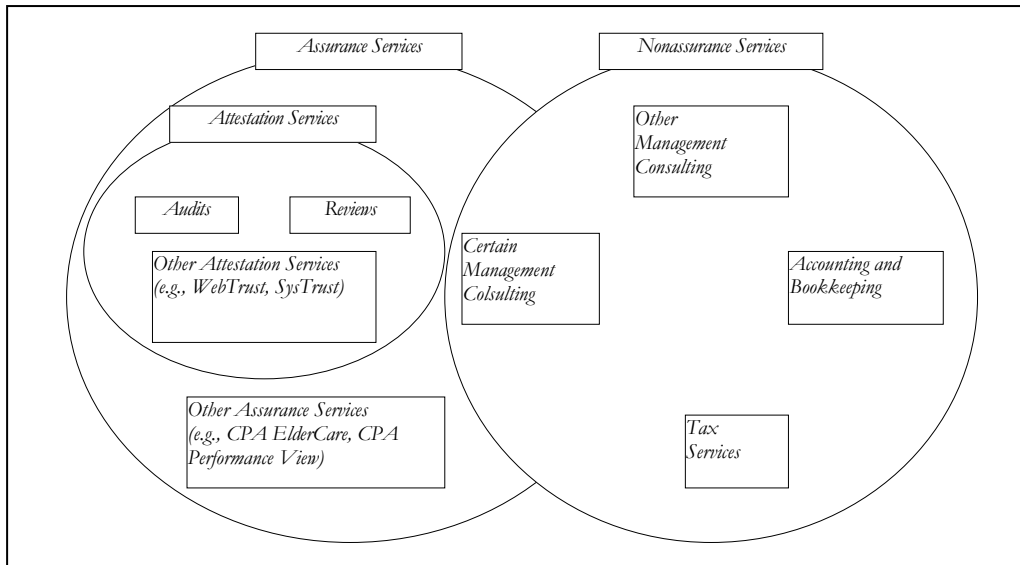
Definisi auditing yang berasal dari *Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association* yang telah dikutip oleh Konrath (2002:3) dan Boynton & Kell (2001:4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing, Atestasi, dan Assurance

Auditing adalah suatu bentuk atestasi yang merupakan suatu bentuk *assurance*. *Committee Assurance Services* dari AICPA mendefinisikan *assurance services* sebagai berikut: *assurance services are independent professional services that improve the quality of information for decision makers*. Hubungan antara *assurance services*, *attestation services*, *audits services*, dan *nonassurance services* oleh Arens et. al. (2003:9) dijelaskan seperti pada Gambar 1.2.



Sumber: Arens et. al. (2003:9)

Gambar 1.2. Hubungan antara assurance services, attestation services, audits services, dan nonassurance services

Pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa jasa yang diberikan dapat berupa jasa *assurance* dan jasa *nonassurance*. Audit merupakan salah satu bentuk jasa atestasi yang merupakan jasa *assurance*. Ruang lingkup jasa *assurance*, atestasi, dan auditing diuraikan oleh Konrath (2002:4) sebagai berikut.

1. *Assurance Service: Improve the quality of information or its context for decision makers, e.g.: reliability of information system, adequacy of risk management systems, effectiveness of performance measurement systems, and adequacy of security over commerce transactions.*
2. *Attestations Service: Render on opinion as to the reliability of someone else's assertions, e.g.: assertions regarding internal control, assertions regarding compliance with contract provisions, and assertions regarding compliance with laws and regulations*
3. *Auditing: Assertions regarding fairness of financial presentation.*

Uraian di atas menunjukkan bahwa *assurance services* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, yang meliputi keandalan sistem informasi, kecukupan sistem manajemen risiko, efektifitas sistem pengukuran kinerja, dan kecukupan keamanan dari transaksi komersial. Dalam jasa atestasi, auditor memberikan opini mengenai keandalan asersi manajemen yang meliputi asersi mengenai pengendalian intern, asersi mengenai ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam auditing, auditor memberikan pernyataan mengenai kewajaran dari penyajian laporan keuangan.

1.4 TUJUAN AUDIT

SPAP (SA Seksi 326 par 03) asersi (*assertions*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. (Catatan: asersi merupakan suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia).

Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini:

Keberadaan atau Keterjadian

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu? Dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu? Dalam SA 326 diberikan contoh misalnya manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual dan penjualan dalam laporan rugi laba menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau bentuk lain (misalnya piutang) dengan pelanggan.

Kelengkapan

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya? Dalam SA 326 dicontohkan manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan dan manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas.

Hak dan Kewajiban

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu? Dalam SA 326 dicontohkan manajemen membuat asersi bahwa sewa guna usaha (*lease*) yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas dan kekayaan yang disewagunausahaan (*leased*) dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas.

Penilaian atau Alokasi

Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya? Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan perolehan semacam ini secara sistematis dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya dan piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya? Misalnya manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya.

Tujuan umum audit untuk menyatakan pendapat atas kewajaran (dalam semua hal yang material) laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan, maka tujuan umum audit dapat dilukiskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Asersi Manajemen dan Tujuan Umum Audit

Asersi Manajemen	Tujuan Umum Audit
Keberadaan atau keterjadian	Aktiva dan kewajiban entitas pada tanggal tertentu dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu.
Kelengkapan	Semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.
Hak dan kewajiban	Aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu.
Penilaian atau alokasi	Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
Penyajian dan pengungkapan	Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya.

Sumber: Mulyadi (1998:69)

1.5 JENIS-JENIS AUDIT

Jenis audit dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu: *operational audits*, *compliance audits*, dan *financial statement audits* yang dijelaskan sebagai berikut:

“An operational audits is a review of any part of an organization’s operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness. The purpose of compliance audit is to determine whether the auditee is following specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority. A financial statement audit is conducted to determine whether the overall financial statements (the information being verified) are stated in accordance with specified criteria.” (Arens et. al. 2003:13-15)

Maksud uraian di atas adalah *operational audit* merupakan review atas bagian-bagian dari prosedur operasi dan metode suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Pada akhir pelaksanaan *operational audit*, biasanya manajemen mengharapkan dapat memperoleh saran-saran untuk memperbaiki kegiatan operasinya. *Operational audit* dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal (independen), dan konsultan manajemen.

Compliance audit bertujuan menentukan apakah auditee mentaati prosedur, persyaratan atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil *compliance audit* biasanya dilaporkan kepada seseorang dalam organisasi yang diaudit (*top management*). *Compliance audit* dapat dilakukan oleh auditor internal, kantor akuntan publik, BPK, dan BPKP.

Financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. *Financial statement audit* dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik, koperasi jasa audit, BPK, dan BPKP.

Untuk memperjelas perbedaan ruang lingkup ke tiga jenis audit tersebut diberikan contoh, informasi, kriteria yang ditentukan, dan bukti yang didapatkan dari masing-masing jenis audit yang terlihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 *Examples of The Three Types of Audits*

Type of audit	Example	Information	Established criteria	Available evidence
<i>Operational audit</i>	<i>Evaluate whether the computerized payroll processing for subsidiary is operating efficiently and effectively</i>	<i>Number of payroll records processed in a month, costs of the department, and number of errors made</i>	<i>Company standards for efficiency and effectiveness in payroll department</i>	<i>Error report, payroll records, and payroll processing cost</i>
<i>Compliance Audit</i>	<i>Determine whether bank requirements for loan continuation have been met</i>	<i>Company records</i>	<i>Loan agreement provisions</i>	<i>Financial statements and calculations by the auditor</i>
<i>Financial statement audit</i>	<i>Annual audit of Boeing's financial statement</i>	<i>Boeing's financial statements</i>	<i>Generally accepted accounting principles</i>	<i>Document, record, and outside sources of evidence</i>

Sumber: Arens et. al. (2003:15)

Selain itu ada jenis pemeriksaan lainnya, diantaranya adalah pemeriksaan intern (internal audit) dan pemeriksaan komputer (*computer audit*).

Audit laporan keuangan ditinjau dari luas pemeriksaan dapat dibedakan menjadi:

1. Pemeriksaan umum (*general audit*) merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Pemeriksaan khusus (*special audit*) merupakan suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan klien) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

1.6 JENIS-JENIS AUDITOR

Para profesional yang bekerja di bidang audit secara umum dikelompokkan menjadi golongan auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern.

Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah.

Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

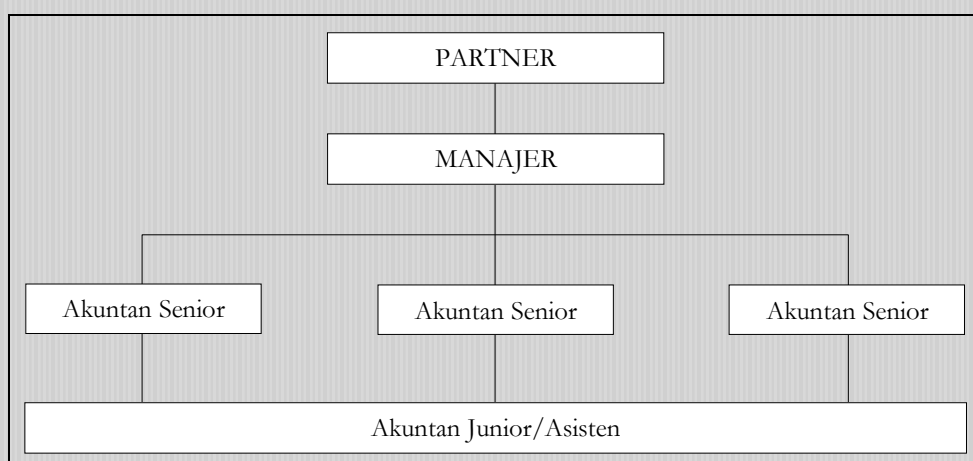
BAB II

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN BENTUK HUKUM

Bentuk hukum suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat berupa perusahaan perseorangan atau persekutuan, dan terdapat juga Koperasi Jasa Audit (KJA) yang memberikan jasa hanya kepada koperasi. Dalam suatu KAP yang berbentuk persekutuan, beberapa akuntan publik bergabung untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama. Biasanya, rekan mempekerjakan tenaga-tenaga profesional untuk membantu mereka. Para asisten ini biasanya adalah akuntan terdaftar, lulusan S1 Akuntansi yang belum memperoleh gelar akuntan, dan mahasiswa jurusan akuntansi tahun terakhir, atau lulusan D3 akuntansi.

Struktur organisasi dalam KAP terdiri atas rekan (partner), manajer, akuntan senior dan akuntan junior/asisten. Karyawan-karyawan yang baru biasanya memulai karier sebagai asisten, dan bertugas pada setiap jenjang kerja selama 2 – 3 tahun pada setiap tingkatan sebelum mencapai kedudukan sebagai rekan (partner). Struktur organisasi KAP disajikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KAP

Penjelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam KAP diuraikan sebagai berikut:

Partner, menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan *audit*, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai *auditing*. Partner menandatangani laporan keuangan dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan *fee audit* dari klien.

Manajer, bertindak sebagai pengawas *audit*, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program *audit* dan waktu *audit*, mereview kertas kerja, laporan *audit* dan *management letter*. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di KAP, yang bertugas mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior.

Auditor Senior, bertugas untuk melaksanakan *audit*, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya *audit* dan waktu *audit* sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melaksanakan *audit* terhadap satu obyek pada saat tertentu.

Auditor Junior/Asisten, melaksanakan prosedur *audit* secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan *audit* yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan *audit*. Biasanya ia melaksanakan *audit* di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah *audit*.

2.2 JASA YANG DIBERIKAN

Sesuai dengan kompetensinya, jasa-jasa yang dapat diberikan KAP meliputi jasa atestasi dan jasa non atestasi.

2.2.1 Jasa Atestasi

Atestasi (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang independen dan kompeten tentang asersi suatu entitas dalam semua hal yang signifikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles*). Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis:

a. **Auditing**

Jasa *auditing* mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa *auditing* disebut dengan istilah auditor. Atas dasar *audit* yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai penyajian laporan keuangan tersebut secara wajar, dalam semua hal yang material (posisi keuangan dan hasil usaha entitas) sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Dalam menghasilkan jasa *auditing* ini, auditor memberikan keyakinan positif (*positive assurance*) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan ingin disampaikan oleh auditor bahwa kesimpulan yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor. Jasa ini merupakan jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasa tradisional profesi akuntan publik.

b. Pemeriksaan (Examination)

Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik. Jasa ini berupa pernyataan pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh jasa pemeriksaan profesi akuntan publik adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat oleh manajemen.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh profesi akuntan publik terhadap laporan keuangan historis disebut dengan istilah *auditing*, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa *auditing* disebut dengan istilah auditor. Pemeriksaan oleh profesi akuntan publik selain terhadap laporan keuangan historis (seperti misalnya terhadap informasi keuangan prospektif) disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan semacam ini disebut dengan praktisi. Dengan demikian istilah *auditing* dan auditor khusus digunakan jika jasa profesi akuntan publik berkaitan dengan atestasi atas asersi yang terkandung dalam laporan keuangan historis.

c. Review

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa *auditing* dan jasa pemeriksaan. Lingkup prosedur review yang digunakan oleh akuntan publik dalam mengumpulkan bukti lebih sempit daripada jasa *auditing* dan jasa pemeriksaan. Dalam menghasilkan jasa *auditing* dan pemeriksaan, akuntan publik melaksanakan berbagai prosedur berikut ini: inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan (*tracing*), pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*), pelaksanaan ulang (*reperforming*), dan analisis.

Dengan hanya dua prosedur (permintaan keterangan dan prosedur analitis) yang dilaksanakan dalam jasa review, akuntan publik memberikan keyakinan negatif atas asersi yang dibuat oleh manajemen, sehingga tingkat keyakinan yang diberikan oleh akuntan dalam laporan hasil *review* lebih rendah daripada jasa *auditing* dan pemeriksaan.

d. Prosedur Yang Disepakati

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan *auditing* dan pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akuntan publik dapat bersepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan untuk seluruh unsur laporan keuangan. Untuk tipe jasa ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review.

2.2.2 Jasa Non Atestasi

Jasa non atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non atestasi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa konsultasi manajemen, dan jasa perpajakan.

Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik manual maupun komputer) transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan.

a. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini, KAP tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Pelaksanaan kompilasi laporan keuangan dilakukan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review dalam SPAP.

b. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi yang diberikan KAP meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kompetensi akuntan publik. Jasa yang diberikan bervariasi mulai dari jasa konsultasi umum kepada manajemen, perancangan dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi. Dalam pemberian jasa konsultasi ini KAP berpegang pada Standar Jasa Konsultasi dan SPAP.

c. Jasa Perpajakan

Kantor Akuntan Publik juga memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi: konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, *review* kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan.

2.3 JENIS-JENIS PENDAPAT AKUNTAN PUBLIK

SPAP: SA Seksi 508, paragraf 10 menjelaskan kelima jenis pendapat akuntan publik seperti berikut ini:

2.3.1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Unqualified opinion diberikan jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan

Publik. Selain itu auditor telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sebuah entitas usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.3.2 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan Yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Standar (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Dalam SPAP: SA Seksi 508, paragraf 11 menyebutkan keadaan yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit meliputi:

- a. pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f. data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-*review*.

- g. informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia–Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite.
- h. informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.3.3 Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar (dalam semua hal yang material) posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin (atas dasar auditnya) bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material, dan auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

2.3.4 Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat ini dinyatakan jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, maka auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat

dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas (jika secara praktis dimungkinkan). Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan laporan audit harus menyatakan hal itu.

2.3.5 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Dalam pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat ini cocok diberikan jika auditor (karena adanya pembatasan terhadap lingkup auditnya) tidak dapat melaksanakan audit yang cukup untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat tidak boleh dinyatakan oleh auditor, jika auditor yakin terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah mengenai alasan auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor tidak perlu harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf (paragraf lingkup audit dalam laporan audit bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, auditor harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

BAB III

STANDAR AUDITING

3.1 STANDAR AUDITING

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut.

Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar Pekerjaan Lapangan

4. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
5. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan

7. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
10. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

3.1.1 Standar Umum

Standar umum berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor, meskipun seseorang ahli dalam bidang keuangan, bidang pemasaran, atau bahkan bidang auditing, tidaklah berarti ia memenuhi standar-standar yang tergolong dalam standar umum.

Keahlian dan Pelatihan Teknis Auditor

Standar umum pertama mengatur persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan profesinya. Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktek akuntansi dan teknik auditing.

Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. Standar umum pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktek akuntansi dan prosedur audit. Pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi. Oleh karena itu, jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya. Agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga

tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktek dalam profesi akuntan publik.

Karena dunia usaha selalu mengalami perubahan dan perkembangan, maka akuntansi yang merupakan penyedia informasi keuangan bagi masyarakat bisnis harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Akuntan publik juga perlu selalu mengikuti perkembangan bidang akuntansi agar tetap dapat menyediakan jasa yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya.

Walaupun pendidikan formal dan pelatihan teknik yang pada awal memasuki profesi akuntan publik telah dipenuhi, namun seorang akuntan publik perlu memperbaruinya setiap saat untuk menyesuaikan dengan perkembangan bidang akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi profesi akuntan publik harus senantiasa menyediakan kesempatan bagi anggota profesinya untuk mengikuti pendidikan professional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Di negara yang telah memiliki profesi akuntan publik yang maju, merupakan suatu keharusan bagi mereka yang terjun dalam bidang profesi akuntan publik secara periodik mengikuti pendidikan berkelanjutan, agar mereka tetap memperoleh izin praktek sebagai akuntan publik.

Independensi auditor

Standar umum kedua mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti, adanya kejujuran diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan

masyarakat meragukan independensinya, sehingga di samping auditor harus benar-benar independen, ia juga harus memberikan persepsi di masyarakat tentang independensinya. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah pemerolehannya.

Independensi auditor terdiri dari 3 aspek.

1. Independensi dalam kenyataan (*independence in fact*) merupakan independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya.
2. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) merupakan independensi dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dipimpin oleh orang tuanya, kemungkinan dapat mempertahankan aspek independensi pertama, karena ia benar-benar jujur dalam mengemukakan hasil auditnya. Namun jika dipandang dari pihak pemakai laporan audit, auditor tersebut memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan perusahaan yang diauditnya, sehingga independensi auditor tersebut diragukan dan dianggap gagal memenuhi aspek independensi yang kedua.
3. Independensi dalam keahlian (*independence in competent*), merupakan independensi yang memandang bahwa seorang auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik dengan keahlian yang dimiliki mengenai audit fakta tersebut. Seorang auditor yang tidak menguasai pengetahuan tentang perbankan, tidak akan mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan perbankan. Auditor tersebut mungkin memiliki independensi dalam hal kejujurannya, tetapi ia tidak memiliki keahlian mengenai objek yang diauditnya. Kompetensi auditor menentukan independen atau tidaknya dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya.

Penggunaan Kemahiran Professional Auditor dengan Cermat dan Seksama

Standar umum ketiga mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan penyusunan laporan auditnya.

Standar ini menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan pertimbangan yang dibuat oleh setiap anggota tim audit dalam proses audit. Standar ini, tidak hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur audit yang semestinya, tetapi meliputi juga penggunaan dan pengkoordinasian prosedur audit. Kecermatan dan keseksamaan meletakkan tanggung jawab kepada setiap auditor dalam organisasi kantor akuntan publik untuk mengamati standar auditing yang berlaku.

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit. Pertimbangan sehat juga diterapkan dalam pelaksanaan pengujian dan prosedur serta dalam mengevaluasi dan melaporkan hasil audit.

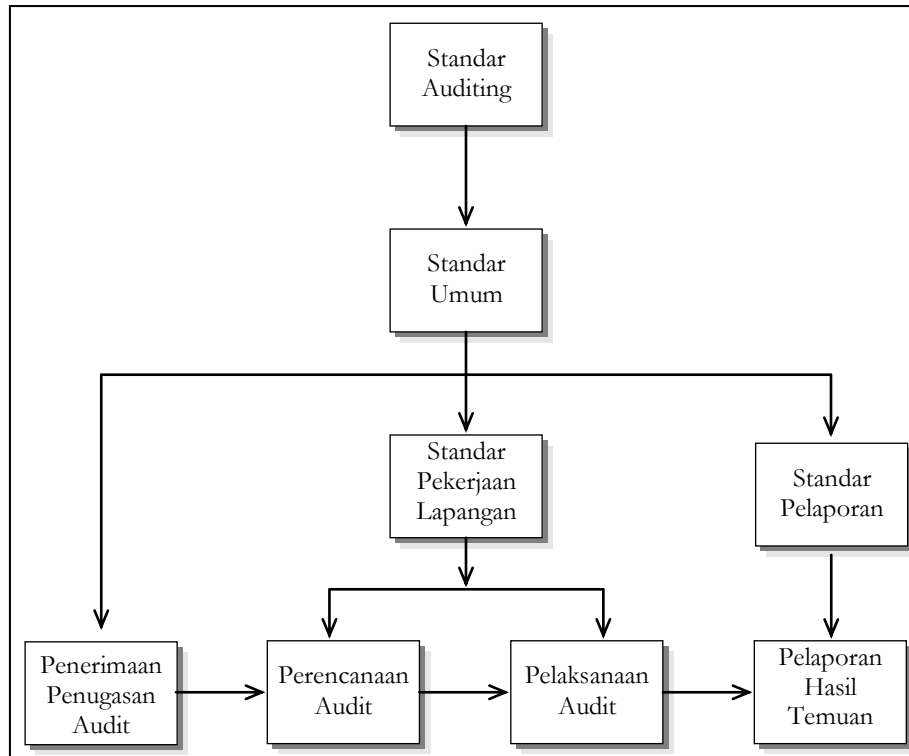
3.1.2 Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan perencanaan auditing, pemahaman terhadap pengendalian intern, dan bukti audit sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Tahapan Audit Laporan Keuangan

Proses audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen harus ditempuh dalam empat tahap yaitu penerimaan penugasan audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil temuan.

Pelaksanaan setiap tahap tidak dapat lepas dari standar auditing karena standar auditing merupakan kriteria dasar pelaksanaan tanggung jawab auditor. Hubungan antara tahapan audit laporan keuangan dengan standar auditing dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Hubungan antara Tahapan Audit dengan Standar Auditing

Penerimaan Penugasan Audit

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan penugasan audit dari klien berulang. Dalam penerimaan penugasan audit antara klien dengan auditor dibuat sebuah surat penugasan audit seperti yang dijelaskan dalam SPAP, SA: Seksi 320: paragraf 05, yang berisi:

1. Tujuan audit atas laporan keuangan.
2. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.
3. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor.
4. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil penugasan.
5. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari

tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi.

6. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit.
7. Pembatasan atas tanggung jawab auditor.
8. Komunikasi melalui *e-mail*.

Auditor dapat pula memasukkan hal berikut ini dalam surat perikatan auditnya:

- a. Pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya.
- b. Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit.
- c. Permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit.
- d. Penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan bagi kliennya.
- e. Basis perhitungan fee dan pengaturan penagihannya.

Jika relevan butir-butir berikut ini dapat pula dimasukkan dalam surat perikatan audit:

- a. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor lain dan/atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit.
- b. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor intern dan staf klien yang lain.
- c. Pengaturan (jika ada) yang harus dibuat dengan auditor pendahulu, dalam hal audit tahun pertama.
- d. Pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada.
- e. Suatu pengacuan ke perjanjian lebih lanjut antara auditor dengan kliennya.

Berikut ini disajikan contoh surat perikatan audit atas laporan keuangan historis. Auditor harus mempertimbangkan berbagai aturan yang digariskan dalam ketentuan di atas sesuai dengan keadaan yang dihadapinya dalam setiap perikatan secara individual.

Kepada
Dewan Komisaris atau Pihak Lain yang memiliki Kewenangan
dan Tanggung Jawab Setara

Saudara telah meminta kami untuk mengaudit neraca PT. KXT (selanjutnya disebut "Perusahaan") tanggal dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Surat ini menegaskan penerimaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini. Audit kami akan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut.

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pendapat kami atas laporan keuangan tersebut adalah tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur audit yang akan kami laksanakan, oleh karena itu kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut di atas.

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan permintaan keterangan dari manajemen tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Kami juga akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada kami selama proses audit kami. Tanggapan manajemen atas permintaan keterangan kami dan pemerolehan pernyataan tertulis dari manajemen diwajibkan oleh standar auditing sebagai bagian dari bakti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar dalam membeirkan pendapat atas laporan keuangan. Karena pentingnya surat pernyataan manajemen tersebut, perusahaan setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada (nama KAP yang bersangkutan) dan stafnya atas segala tuntutan, kewajiban, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan dengan jasa audit yang kami berikan sesuai dengan perikatan ini.

Audit kami mengandung risiko bawaan bila terdapat kekeliruan dan ketidakberesan material, termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak akan terdeteksi. Namun, bila kami menemukan adanya hal-hal tersebut dalam audit kami, informasi tersebut akan kami sampaikan kepada Saudara.

Sebagai tambahan laporan audit kami atas laporan keuangan, kami akan menyampaikan surat terpisah tentang kelemahan signifikan pengendalian intern yang kami temukan dalam audit yang kami lakukan.

Kami mengingatkan Saudara bahwa tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, termasuk pengungkapan memadai merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup pula penyelenggaraan catatan akuntansi

dan pengendalian intern memadai. Sebagai bagian dari proses audit, kami akan meminta penegasan tertulis dari Saudara tentang representasi yang Saudara buat untuk kami dalam rangka audit yang kami laksanakan.

Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara dan kami yakin bahwa mereka akan menyediakan catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang kami perlukan dalam rangka audit kami. Berdasarkan diskusi tentang operasi perusahaan dan perencanaan audit kami, fee audit kami perkirakan sebesar Rp ditambah *direct out of pocket expenses* dan pajak pertambahan nilai. Fee tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi untuk melaksanakan audit ini dan tarif per jam staf yang kami tugasi, yang bervariasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan. Jumlah tersebut akan kami tagih sesuai dengan kemajuan pekerjaan kami.

Surat perikatan audit ini akan efektif berlaku untuk tahun-tahun yang akan datang kecuali jika dihentikan, diubah, atau diganti.

Silakan menandatangani dan mengembalikan *copy* surat perikatan audit terlampir yang menunjukkan kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan tersebut di atas.

Terima kasih atas kesempatan yang Saudara berikan kepada kami untuk menyediakan jasa audit bagi Saudara.

PT. KXT

Kantor Akuntan Publik

Perencanaan Audit

Langkah berikutnya setelah penugasan audit diterima auditor adalah perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian penugasan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat auditor. Penunjukan auditor independen secara dini memungkinkan auditor merencanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien.

Pelaksanaan Audit

Tahap ketiga pekerjaan audit adalah pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus mengacu pada standar pekerjaan lapangan dalam standar auditing. Tujuan utama pelaksanaan

pekerjaan lapangan untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien.

Pelaporan Hasil Temuan

Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu pada standar pelaporan. Terdapat dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit antara lain:

- a. Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Setelah semua prosedur audit yang diperlukan selesai dilaksanakan, auditor menggabungkan informasi yang dihasilkan melalui berbagai prosedur audit. Kemudian menarik kesimpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Proses ini bersifat subyektif, sehingga sangat tergantung pertimbangan profesional auditor.
- b. Menerbitkan laporan audit. Akhir proses ini adalah menyajikan laporan audit (*audit report*) yang dilampiri laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien.

Laporan auditor bentuk baku mencakup laporan keuangan pokok yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok, yang biasanya berisi ikhtisar kebijakan akuntansi penting, penjelasan atas pos-pos penting laporan keuangan, dan daftar serta bahan penjelasan lain yang disebutkan sebagai bagian dari laporan keuangan pokok.

Pertimbangan untuk menerima penugasan audit perlu dilakukan terutama apabila auditor belum pernah mengenal maupun berhubungan dengan klien. Pertimbangan untuk menerima penugasan audit berkaitan erat dengan standar umum. Perencanaan audit merupakan suatu hal yang sangat vital. Perencanaan audit berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan audit. Perencanaan audit yang kurang baik akan berakibat kegagalan audit. Tahap perencanaan audit berkaitan erat dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan

Pengujian atau tes audit dimaksudkan untuk menghimpun bukti mengenai struktur pengendalian intern dan untuk memberikan dasar untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Tahap pelaksanaan berkaitan erat dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Pelaporan hasil yang didasarkan atas berbagai temuan, dilakukan dalam bentuk laporan auditor independen. Auditor juga dapat melaporkan temuan lain, misalnya pelaporan mengenai pengendalian intern. Tahap pelaporan temuan berkaitan erat dengan standar umum dan standar pelaporan.

3.2 BUKTI AUDIT

Sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, auditor mengumpulkan bukti audit. Meskipun catatan akuntansi menyediakan bukti audit yang cukup untuk mendukung pendapat auditor, namun catatan tersebut bukan merupakan satu-satunya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor.

Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi, perhitungan dan alokasi biaya, rekonsiliasi bank, rekonsiliasi utang-piutang merupakan bukti pendukung laporan keuangan. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup untuk suatu laporan keuangan, dipihak lain tanpa cukup memperhatikan atas kewajaran dan kecermatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin kecermatannya.

Bukti audit penguat meliputi segala dokumen seperti check, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh auditor melalui pengajuan pertanyaan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan atau tersedia bagi auditor yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat.

Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak yang independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat lebih diandalkan/dipercaya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri (bukti intern).

Bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut.

Pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan dan inspeksi, lebih bersifat menyimpulkan (*persuasive evidence*) daripada bukti yang bersifat meyakinkan (*convincing evidence*).

Prosedur Audit

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi: inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi.

Pemilihan prosedur auditing mempertimbangkan efektivitas potensial prosedur dalam memenuhi tujuan spesifik audit, dan biaya untuk melaksanakan prosedur tersebut. Prosedur auditing yang digunakan untuk memperoleh informasi penguat meliputi:

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Inspeksi sering dilakukan auditor terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Misalnya dengan inspeksi terhadap kondisi fisik aktiva tetap, auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut.

2. Pengamatan

Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Obyek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur dan proses. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh auditor dalam auditnya antara lain: penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien, pembuatan dan persetujuan *voucher*, cara penyimpanan kas yang ada di tangan klien.

3. Konfirmasi

Konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup:

- a. Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi
- b. Pendesainan permintaan konfirmasi
- c. Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan
- d. Pemerolehan jawaban dari pihak ketiga
- e. Penilaian terhadap informasi atas tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut.

Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.
- b. Auditor meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut.
- c. Auditor meminta jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.

4. Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan dokumenter. Contoh prosedur audit ini adalah permintaan keterangan auditor mengenai tingkat keusangan persediaan yang ada di gudang, dan lain-lain

5. Penelusuran

Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor melakukan penelusuran informasi sejak data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur audit ini terutama diterapkan terhadap bukti dokumenter. Penelusuran dilakukan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi. Contoh prosedur penelusuran yang dilakukan auditor adalah pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari *customer*, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan

dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha.

6. Pemeriksaan Dokumen Pendukung

Pemeriksaan dokumen pendukung (*vouching*) merupakan prosedur audit yang meliputi:

- a. Inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
- b. Perbandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.

Pemeriksaan dokumen pendukung dilaksanakan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Prosedur audit ini berlawanan arahnya dengan prosedur penelusuran. Dalam penelusuran auditor tertolak dari dokumen kemudian mengusut pencatatannya ke catatan-catatan akuntansi yang berkaitan. Dalam *vouching* auditor bertolak dari catatan akuntansi, kembali memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut.

7. Penghitungan

Prosedur audit ini meliputi penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau persediaan di tangan, dan pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Penghitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.

8. Scanning

Scanning merupakan penelaahan secara tepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa dengan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan Ulang

Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. Contohnya: penghitungan ulang jumlah total dalam jurnal, perhitungan

ulang biaya depresiasi, biaya bunga terutang, perkalian antara kuantitas dengan harga satuan dalam *inventory summary sheets*, dan penghitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank.

Kertas Kerja Audit

Kertas kerja (*working paper*) merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. SPAP (SA Seksi 339, par 3), mendefinisikan kertas kerja merupakan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.

Tujuan menyeluruh kertas kerja adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan SPAP yang ditetapkan IAI, dan secara lebih spesifik tujuan kertas kerja adalah sebagai dasar perencanaan audit, pencatatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, data untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, dan dasar untuk menelaah oleh akuntan senior dan partner.

Contoh kertas kerja antara lain program audit, memorandum, surat konfirmasi, representasi, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor.

Terdapat 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja, antara lain:

1. Pembuatan *heading*, yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasi isi kertas kerja, serta tanggal neraca atau periode audit.
2. Nomor indeks, untuk memudahkan indentifikasi dan referensi silang antar kertas kerja yang umumnya didasarkan pada urutan akun dan diikuti nomor halamannya.
3. *Tick marks*, berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif di manapun dalam kertas kerja. Setiap simbol dihubungkan dengan penjelasan sifat dan luas pekerjaan yang dilakukan.
4. Pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaahan.

Auditor biasanya menyelenggarakan dua macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya:

1. Arsip kini (*current file*), arsip audit tahunan setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja.
2. Arsip permanen (*permanent file*) untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan.

Isi kertas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat auditor dalam auditnya. Kertas kerja terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam lima jenis kertas kerja berikut ini:

Program Audit

Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Dalam program audit, auditor menyebutkan:

- a. Pemeriksaan yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap elemen yang tercantum dalam laporan keuangan.
- b. Tanggal pelaksanaan prosedur audit
- c. Paraf pelaksana prosedur audit
- d. Penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan auditor

Audit program yang baik harus mencantumkan:

- a. Tujuan pemeriksaan
- b. Audit prosedur yang akan dilaksanakan
- c. Kesimpulan pemeriksaan

Program audit ini berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan lapangan.

Skedul Utama

Skedul utama merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Skedul utama mempunyai kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam *working trial balance*. Jumlah total setiap kolom dalam skedul utama dipindahkan ke dalam kolom yang berkaitan dalam *working trial balance*.

Skedul Pendukung

Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, auditor membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap skedul pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Skedul pendukung harus memuat juga berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor.

Jurnal Penyesuaian

Dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat *draft adjustment journal* yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Di samping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali (*reclassification entries*) meskipun tidak salah dicatat, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar, harus digolongkan kembali.

Adjustment Journal yang diusulkan biasanya diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap *adjustment journal* dan *reclassification journal* harus disertai penjelasan yang lengkap.

Adjustment journal berbeda dengan *reclassification journal*. *Reclassification journal* digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Jurnal ini digunakan untuk menggolongkan kembali suatu jumlah dalam kertas kerja auditor, tidak untuk disarankan agar dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien.

Working Trial Balance

Working trial balance merupakan suatu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang audit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian dan pengklasifikasian kembali, serta saldo setelah koreksi auditor dan akan dicantumkan dalam laporan keuangan auditan, yang dapat disiapkan oleh klien maupun auditor. *Working trial balance* yang dibuat oleh klien harus diverifikasi dengan posting kolom dan pengusutan (*tracing*) saldo akun ke buku besar. *Working trial balance* merupakan dasar untuk pemeriksaan kertas kerja

secara individual dan merupakan ringkasan semua data yang diperoleh selama pemeriksaan.

3.3 RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS

Pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas. Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

SPAP (Seksi 312 par 10) menyebutkan, materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji (dilihat dari keadaan yang melingkupinya) mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Frasa "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia" menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material.

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

Dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah yang mungkin material terhadap laporan keuangan, auditor tidak

bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa salah saji, yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan, tidak material terhadap laporan keuangan.

Dalam situasi tertentu, untuk perencanaan audit, auditor mempertimbangkan materialitas sebelum laporan keuangan yang akan diauditnya selesai disusun. Pertimbangan awal auditor tentang materialitas mungkin didasarkan atas laporan keuangan interim satuan usaha tersebut yang disetahunkan atau laporan keuangan tahunan satu periode atau lebih sebelumnya, asalkan auditor memperhatikan pengaruh perubahan besar dalam satuan usaha tersebut dan perubahan lain yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan atau industri yang merupakan tempat satuan usaha tersebut berusaha.

Pada tingkat saldo perkiraan atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*) bahwa saldo perkiraan atau golongan transaksi mengandung salah saji yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo perkiraan atau golongan transaksi lainnya, dan risiko deteksi (*detection risk*) bahwa auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan pertimbangan profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya.

Risiko bawaan merupakan kerentanan suatu saldo perkiraan atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijaksanaan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait.

Risiko pengendalian merupakan risiko salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern satuan usaha. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk mencapai tujuan umum struktur pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan satuan usaha. Risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian intern.

Risiko deteksi merupakan risiko tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor.

Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tidak bisa dihindari, terlepas dari dilakukan atau tidak audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor.

BAB IV

LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Pada Bab II telah dijelaskan jenis-jenis opini akuntan publik yang didasarkan pada SPAP: SA Seksi 508, paragraf 10. Contoh opini akuntan publik dapat dilihat pada uraian berikut ini.

4.1 CONTOH OPINI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

1. Laporan Auditor Bentuk Baku yang meliputi satu periode akuntansi disajikan sebagai berikut:

<u>Laporan Auditor Independen</u>
<p><i>(Pihak yang dituju oleh auditor)</i></p> <p>Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.</p> <p>Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.</p> <p>Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p><i>(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)</i></p> <p><i>(Tanggal)</i></p>

2. Contoh Laporan bentuk baku atas laporan keuangan komparatif disajikan sebagai berikut:

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

3. Bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan keuangan auditor independen lain (pemisahan tanggung jawab)

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian perusahaan KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan perusahaan PQR, suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan KXT, yang laporan keuangannya menyajikan total aktiva sebesar Rp_____ dan Rp_____ berturut-turut pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, dan total pendapatan Rp_____ dan Rp_____ untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk perusahaan PQR, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

4. Contoh pendapat wajar dengan pengecualian karena pembatasan yang berhubungan dengan investasi dalam anak perusahaan di luar negeri (misalnya dampak pembatasan tersebut tidak menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat) adalah sebagai berikut:

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

(Sama dengan paragraf pertama laporan auditor bentuk baku)

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Kami tidak dapat memperoleh laporan keuangan auditan oleh auditor independen lain yang mendukung investasi Perusahaan dalam anak perusahaan diluar negeri masing-masing sebesar Rp_____ dan Rp_____ pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, atau hak atas laba anak perusahaan sebesar Rp_____ dan Rp_____ yang dicantumkan dalam laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diatas, seperti yang dijelaskan pada Catatan X dalam catatan atas laporan keuangan. Kami juga tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai investasi dalam anak perusahaan diluar negeri tersebut beserta hak atas labanya dengan prosedur audit kami.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika kami memeriksa bukti tentang investasi di luar negeri dan labanya tersebut, laporan keuangan kami sebut dalam paragraf pertama di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

5. Contoh pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor dalam audit terhadap neraca saja (laporan ini disusun dengan asumsi bahwa auditor telah memperoleh keyakinan mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi):

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, neraca yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

6. Contoh laporan auditor yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian karena penggunaan prinsip akuntansi yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia disajikan berikut ini (dianggap bahwa dampak penyimpangan tersebut tidak menyebabkan auditor memberikan pendapat tidak wajar):

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

(Sama dengan paragraf pertama dan kedua laporan auditor bentuk baku)

Perusahaan tidak mengakui aktiva dan kewajiban sewa guna usaha tertentu dalam neraca terlampir, dan yang menurut pendapat kami, jumlah tersebut seharusnya diakui agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika kewajiban sewa guna usaha ini diakui, aktiva tetap akan bertambah sebesar Rp____ dan Rp____, kewajiban jangka panjang sebesar Rp____ dan Rp____, dan saldo laba masing-masing sebesar Rp____ dan Rp____ pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1. Di samping itu, laba bersih akan bertambah (berkurang) masing-masing sebesar Rp____ dan Rp____ dan laba per saham akan bertambah (berkurang) masing-masing sebesar Rp____ dan Rp____ untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak tidak diakuinya aktiva dan kewajiban sewa guna usaha tertentu seperti yang kami uraikan dalam paragraph di atas, laporan keuangan yang kami sebut dalam paragraf di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

7. Jika penyimpangan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, paragraf terpisah (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam laporan auditor yang disajikan di atas perlu diubah menjadi sebagai berikut:

Seperti dijelaskan lebih lengkap pada Catatan X atas laporan keuangan, perusahaan tidak mengakui aktiva dan kewajiban sewa guna usaha dalam neraca terlampir. Menurut pendapat kami, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan penyajian aktiva dan kewajiban tersebut dalam neraca.

8. Contoh laporan auditor yang berisi pengecualian karena adanya pengungkapan yang tidak cukup (dianggap dampak pengungkapan yang tidak cukup ini tidak mengakibatkan auditor memberikan pendapat tidak wajar)

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

(Sama dengan paragraf pertama dan kedua laporan auditor bentuk baku)

Laporan keuangan perusahaan tidak mengungkapkan (uraikan sifat pengungkapan yang tidak disajikan). Menurut pendapat kami, pengungkapan informasi ini diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya informasi yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut dalam di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT

tanggal 31 Desember 20X2, dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

9. Contoh laporan auditor yang berisi pengecualian karena auditor tidak diharuskan untuk membuat laporan keuangan pokok (seperti, laporan arus kas untuk satu atau lebih periode) dan memasukkannya dalam laporan auditor, jika manajemen perusahaan menolak untuk menyajikan laporan tersebut.

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

(Sama dengan paragraf kedua laporan auditor bentuk baku)

Perusahaan menolak menyajikan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1. Penyajian laporan yang meringkas kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan tersebut diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya laporan arus kas yang mengakibatkan tidak lengkapnya penyajian seperti diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

10. Jika manajemen tidak memberikan alasan yang masuk akal tentang perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan, auditor harus menyatakan pengecualian mengenai perubahan akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan tanpa alasan yang masuk akal tersebut. Contoh laporan auditor yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian dengan alasan tersebut adalah sebagai berikut.

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

(Sama dengan paragraf pertama dan kedua laporan auditor bentuk baku)

Seperti dijelaskan dalam Catatan X atas laporan keuangan, dalam tahun 20X2 perusahaan menerapkan metode akuntansi masuk pertama, keluar pertama untuk sediaannya, yang sebelumnya perusahaan menggunakan metode masuk terakhir, keluar pertama. Meskipun penggunaan metode masuk pertama, keluar pertama sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, menurut pendapat kami perusahaan tidak memberikan alasan yang masuk akal dalam melakukan perubahan ini seperti yang diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, kecuali perubahan akuntansi seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut dalam di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan 20X1, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

11. Jika pendapat tidak wajar dinyatakan oleh auditor, paragraf pendapat harus berisi perujukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut, seperti contoh berikut ini:

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

(Sama dengan paragraf pertama dan kedua laporan auditor bentuk baku)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan X atas laporan keuangan, Perusahaan mencantumkan akun mesin dan ekuipmen pada nilai yang ditetapkan oleh manajemen, dan menghitung penyusutannya berdasarkan nilai tersebut. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan penyajian aktiva tetap pada kos atau nilai revaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikurangi dengan penyusutan akumulasi yang dihitung berdasarkan nilai tersebut.

Karena penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti yang diuraikan di atas, pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, saldo sediaan lebih tinggi sebesar Rp_____ dan Rp_____ dengan memperhitungkannya biaya penyusutan ke dalam biaya *overhead* publik dibandingkan akumulasi disajikan lebih tinggi Rp_____ dan Rp_____ dibandingkan jika disajikan atas dasar kosnya.

Menurut pendapat kami, karena dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut dalam di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan 20X1, atau hasil usaha, atau arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

12. Contoh laporan auditor yang berisi pernyataan tidak memberikan pendapat sehingga akibat ketidakberhasilan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup karena pembatasan lingkup audit disajikan sebagai berikut:

Laporan Auditor Independen

(Pihak yang dituju oleh auditor)

Kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

(Paragraf kedua laporan auditor bentuk baku tidak perlu dicantumkan)

Perusahaan tidak melakukan penghitungan fisik sediaan dalam tahun 20X2, atau 20X1, yang dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar Rp_____ pada tanggal 31 Desember 20X2 dan Rp_____ pada tanggal 31 Desember 20X1. Lebih lanjut, bukti-bukti yang mendukung kos aktiva tetap yang dibeli sebelum tanggal 31 Desember 20X1 tidak lagi tersedia dalam arsip perusahaan. Catatan perusahaan tidak memungkinkan dilaksanakannya penerapan prosedur audit lain terhadap sediaan dan aktiva tetap.

Karena perusahaan tidak melaksanakan penghitungan fisik sediaan dan kami tidak dapat menerapkan prosedur audit untuk meyakinkan kami atas kuantitas sediaan dan kos aktiva tetap, lingkup audit kami tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan, dan kami tidak menyatakan, pendapat atas laporan keuangan.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor ijin akuntan publik, nomor ijin kantor akuntan publik)

(Tanggal)

13. Pendapat tidak penuh (pernyataan pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan) tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau ia menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, karena pendapat tidak penuh dalam hal ini cenderung mengaburkan arti pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar terhadap laporan keuangan secara keseluruhan tersebut.

4.2 CONTOH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Nomor:101/MW.1.1/LA/II/2003

Kepada
Yth. Dewan Direksi CV. Prathama Jaya
Jember - Jawa Timur

Kami telah mengaudit neraca CV. Prathama Jaya Jember tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 serta laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit, agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Perusahaan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Kami tidak dapat memperoleh laporan keuangan auditan oleh auditor independen lain yang mendukung persediaan perusahaan sebesar Rp 256.799.902,- dan Rp 78.175.424,- pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 yang dicantumkan dalam neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, seperti yang dijelaskan pada Catatan 2,7 dalam catatan atas laporan keuangan. Kami juga tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai persediaan dalam Perusahaan dengan prosedur audit kami.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika kami memeriksa bukti tentang persediaan Perusahaan, laporan keuangan yang kami sebut dalam paragraf pertama di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **CV. Prathama Jaya Jember** tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KAP. WARTONO & CO

Managing Partner,

Drs. Wartono, M.Si., Ak.

No. Register: D - 4816

Ijin Usaha: KEP-292/KM.6/2002

12 Pebruari 2003

CV. PRATHAMA JAYA
NERACA

Per 31 Desember 2002 dan 2001

AKTIVA	Catatan	Tahun 2002	Tahun 2001	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	Tahun 2002	Tahun 2001
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas dan Bank	3	333,870,827	91,184,934	Hutang Dagang	8	226,483,500	9,469,500
Piutang	2.4	543,331,763	150,785,800	Hutang Bank	9	163,000,000	237,914,800
Cadangan Kerugian Piutang		-	-	Hutang Bunga	10	1,390,000	8,018,750
Biaya Dibayar Dimuka	5	109,317,882	21,307,844	Hutang Kendaraan Yg Jth Tempo		3,628,000	4,404,000
Persediaan	2.6	256,799,902	78,175,424	<i>Jumlah Kewajiban Jgk. Pdk</i>		<u>394,501,500</u>	<u>259,807,050</u>
<i>Jumlah Aktiva Lancar</i>		<u>1,243,320,374</u>	<u>341,454,002</u>				
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Biaya Perolehan	2.7	131,368,800	88,066,800	Hutang Kendaraan	11	11,733,000	5,505,000
Akumulasi Penyusutan		(48,915,727)	(8,174,701)	<i>Jumlah Kewajiban</i>		<u>406,234,500</u>	<u>265,312,050</u>
<i>Nilai Buku</i>		<u>82,453,073</u>	<u>79,892,099</u>				
TOTAL AKTIVA		<u>1,325,773,447</u>	<u>421,346,101</u>	EKUITAS			
				Modal Prathama	12	919,538,947	156,034,051
				TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		<u>1,325,773,447</u>	<u>421,346,101</u>

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CV. PRATHAMA JAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

KETERANGAN	Tahun 2002	Tahun 2001
Modal Prathama, Awal Tahun	156,034,051	40,500,000
Ditambah :		
Laba Bersih	763,504,896	-
Dikurangi :		
Prive	-	-
Rugi Bersih	-	115,534,051
Modal Prathama, Akhir Tahun	919,538,947	156,034,051

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CV. PRATHAMA JAYA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

KETERANGAN	Catatan	Tahun 2002	Tahun 2001
Pendapatan			
<i>Pendapatan Usaha</i>	2,13	3,075,581,845	1,272,904,658
Harga Pokok Penjualan	2,14	1,937,823,426	1,059,495,535
Laba Kotor		1,137,758,419	213,409,123
Beban Usaha			
<i>Beban Administrasi dan Umum</i>	2,15	318,713,688	91,897,457
<i>Beban Pemasaran</i>		25,564,650	-
Jumlah Beban Usaha		344,278,338	91,897,457
Laba Bersih Sebelum Pos Lain-Lain		793,480,081	121,511,666
Pos Lain-Lain	2,16	(29,975,185)	(5,977,615)
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		763,504,896	115,534,051

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CV. PRATHAMA JAYA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

KETERANGAN	Tahun 2002	Tahun 2001
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	763,504,896	115,534,051
Penyesuaian ke dasar kas :		
- Penyusutan aktiva tetap	40,741,026	8,174,701
- Cadangan Kerugian Piutang	-	-
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	804,245,922	123,708,752
- Kenaikan Piutang	(392,545,963)	(150,785,800)
- Kenaikan Biaya Dibayar Dimuka	(88,010,038)	(21,307,844)
- Kenaikan Persediaan	(178,624,478)	(78,175,424)
- Kenaikan Hutang Dagang	217,014,000	9,469,500
- Kenaikan (Penurunan) Hutang Bank	(74,914,800)	237,914,800
- Kenaikan (Penurunan) Bunga	(6,628,750)	8,018,750
- Kenaikan Kendaraan Yang Telah Jatuh Tempo	(776,000)	4,404,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	279,759,893	133,246,734
II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
- Kenaikan aktiva tetap	(43,302,000)	(88,066,800)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(43,302,000)	(88,066,800)
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan Hutang Kendaraan	6,228,000	5,505,000
- Kenaikan Modal	-	40,500,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	6,228,000	46,005,000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	242,685,893	91,184,934
Kas dan Setara Kas pada awal periode	91,184,934	-
Kas dan Setara Kas pada akhir periode	333,870,827	91,184,934

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CV. PRATHAMA JAYA
RATIO KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

KETERANGAN	Tahun 2002	Tahun 2001
I. RENTABILITAS		
1.1 Struktur Perhitungan Hasil Usaha		
- Pendapatan	100.00%	100.00%
- Harga Pokok Penjualan	63.01%	83.23%
- Beban Usaha	11.19%	7.22%
- Pos Lain-Lain	-0.97%	-0.47%
- Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	24.82%	9.08%
1.2 Return On Equity :		
$\frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$	763,504,896 919,538,947 83.03%	115,534,051 156,034,051 74.04%
1.3 Earning Power		
Profit Margin :		
$\frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	763,504,896 3,075,581,845 24.82%	115,534,051 1,272,904,658 9.08%
Asset Turnover :		
$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}}$ kali	3,075,581,845 1,325,773,447 2.32	1,272,904,658 421,346,101 3.02
Earning Power :		
Asset Turnover x Profit Margin	0.58	0.27
II. RATIO LIKUIDITAS		
2.1 Current Ratio :		
$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$	1,243,320,374 394,501,500 315.16%	341,454,002 259,807,050 131.43%
2.2 Cash Ratio :		
$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$	333,870,827 394,501,500 84.63%	91,184,934 259,807,050 35.10%
III. RATIO SOLVABILITAS		
3.1 Asset To Debt Ratio :		
$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\%$	1,325,773,447 406,234,500 326.36%	421,346,101 265,312,050 158.81%
3.2 Debt To Equity Ratio :		
$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$	406,234,500 919,538,947 44.18%	265,312,050 156,034,051 170.03%

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. U M U M

CV. Prathama Jaya didirikan bulan Oktober 2002 No. 29 dihadapan Notaris Agung Kuncoro. Perusahaan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 116/13-7/PK/III/2002 dan Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 130735201009 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember serta Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 2.016.004.0-622.

Kegiatan utama CV. Prathama Jaya adalah dibidang penjualan barang dagangan. Adapun pengurus CV. Prathama Jaya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Direktur : Elviera Is Mayarani
- ⇒ Wakil Direktur : Ryan Ravi Is Syah Putra
- ⇒ Kepala Akuntansi : MW. Ramadani Is Arafii
- ⇒ Personalia : Titin Wartini

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

⇒ Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

⇒ Penyajian Laporan Keuangan

Jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatannya telah dibulatkan menjadi rupiah penuh.

⇒ Piutang

Piutang disajikan berdasarkan nilai brutonya. Perusahaan melakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang.

⇒ Persediaan

Persediaan dinilai dan disajikan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

⇒ Aktiva Tetap

a. Tingkat materialitas aktiva tetap:

- Harga perolehan minimal Rp 50.000,00.
- Biaya perbaikan minimal Rp 500.000,00 (direalisasikan mulai tahun 2003)

b. Penyusutan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 11 sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<i>Bukan Bangunan</i>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<i>Bangunan</i>			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

⇒ **Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat barang dagangan telah terjual.

⇒ **Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi (*Accrual Basis*) kecuali untuk pos-pos biaya rutin dan tidak material perbedaannya, dicatat dengan metode Cash Basis.

3. KAS dan BANK

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2002 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
- Kas	31.969.516	10.494.875
- Bank	302.901.311	80.690.059
<i>Jumlah Kas dan Bank</i>	<u>333.870.827</u>	<u>91.184.934</u>

4. PIUTANG

Saldo Piutang per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
- Piutang Dagang	510.240.463	150.785.800
- Piutang Uang	30.000.000	-
- Piutang Karyawan	3.091.300	-
<i>Jumlah Piutang</i>	<u>543.331.763</u>	<u>150.785.800</u>

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
- Sewa Kantor	23.598.690	21.307.844
- Sewa Garasi	250.000	-
- Panjar	82.115.025	-
- Sewa Rumah	3.354.167	-
<i>Jumlah Biaya Dibayar Dimuka</i>	<u>109.317.882</u>	<u>21.307.844</u>

6. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2002 dan 2001 yang terdapat di stock gudang Rp 256.799.902,- dan Rp 78.175.424,-

7. AKTIVA TETAP

Saldo Nilai Buku Aktiva Tetap per 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 82.453.073,- dan Rp 79.892.099. Rincian harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dapat dilihat pada lampiran.

8. HUTANG

Saldo Hutang Dagang per 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah berjumlah Rp 226.483.500,- dan 9.469.500,-

9. HUTANG BANK

Saldo Hutang Bank per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
- Hutang Bank BNI	150.000.000	125.000.000
- Hutang Bank BRI	13.000.000	65.000.000
- Hutang Bank Jatim	-	47.914.800
<i>Jumlah Hutang Bank</i>	<u>163.000.000</u>	<u>237.914.800</u>

10. Hutang Bunga

Saldo Hutang Bunga per 31 Desember 2002 dan 2001 yang belum dibayar kepada bank masing-masing sebesar Rp 1.390.000, dan Rp 8.018.750,-

11. HUTANG KENDARAAN

Saldo Hutang Kendaraan per 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 11.733.000,- dan Rp5.505.000,-

12. MODAL

Saldo Modal per 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
- Modal Prathama	40.500.000	40.500.000
- Laba Yang Belum Dibagi	115.534.051	-
- Laba Tahun Berjalan	763.504.896	115.534.051
<i>Jumlah Modal</i>	<u>919.538.947</u>	<u>156.034.051</u>

13. PENDAPATAN USAHA

Jumlah Pendapatan Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
- Penjualan Barang Dagangan	3.722.323.245	1.270.634.859
- Pendapatan Bunga	3.258.600	2.269.799
<i>Jumlah Pendapatan Usaha</i>	<u>3.075.581.845</u>	<u>1.272.904.658</u>

14. HARGA POKOK PENJUALAN

Jumlah Harga Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 1.937.823.426,- dan Rp1.059.495.535,-

15. BEBAN USAHA

Jumlah Beban Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
Beban Administrasi dan Umum:		
- Beban Gaji Karyawan	102.053.000	31.700.000
- Beban THR	9.605.000	-
- Beban Adm dan Fotocopy	24.933.535	14.789.350
- Beban Listrik dan Air	13.300.425	1.042.350
- Beban Telepon	28.889.000	11.123.200
- Beban Depresiasi Aktiva Tetap	32.997.885	8.174.701
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	34.137.200	7.586.050
- Beban Perbaikan Kantor	7.117.075	-
- Beban Pajak	4.146.375	153.750
- Beban Premium	9.726.425	-
- Beban Pengangkutan	21.063.700	6.605.450
- Beban Perjalanan Dinas	13.278.175	7.056.650
- Beban SIUP	1.400.000	-
- Beban Pemeliharaan Peralatan	376.250	-
- Beban Seragam	3.339.250	-
- Beban Sewa	12.350.393	3.665.956
<i>Jumlah Beban Adm. & Umum</i>	<u>318.713.688</u>	<u>91.897.457</u>
Beban Pemasaran	25.564.650	-
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	<u>344.278.338</u>	<u>121.511.666</u>

16. POS LAIN-LAIN

Jumlah Pos Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 terdiri:

Keterangan	Tahun 2002	Tahun 2001
Pendapatan Pelatihan	10.500.000	1.395.985
Beban Administrasi Bank	(765.491)	(48.000)
Beban Pph. Bunga Bank	(115.010)	(6.577.000)
Beban Provisi	(5.396.700)	-
Beban Bunga Hutang	(24.159.084)	-
Beban Sumbangan	(10.038.900)	(748.600)
<i>Jumlah Pos Lain-Lain (net)</i>	<u>(29.975.185)</u>	<u>(5.977.615)</u>

Lampiran

DAFTAR AKTIVA TETAP

Per 31 Desember

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Kwt	Klp	%	Cost	Depresiasi	Akm Depr 2002	Nilai Buku 31-Dec-02	Jumlah
Kendaraan										
1	Toyota Kijang	31 Oct 2001	1	II	25%	58,919,700	14,116,178	16,571,166	42,348,534	58,919,700
2	Honda	01 Mar 2001	1	I	50%	11,700,000	3,412,500	8,287,500	3,412,500	11,700,000
3	Honda	01 Mar 2001	1	I	50%	7,800,000	2,275,000	5,525,000	2,275,000	7,800,000
4	Supra Tromol	01 Oct 2001	1	I	50%	16,010,000	7,004,375	9,005,625	7,004,375	16,010,000
5	Supra X	01 Nov 2002	1	I	50%	16,560,000	1,380,000	1,380,000	15,180,000	16,560,000
<i>Jumlah</i>						<i>110,989,700</i>	<i>28,188,053</i>	<i>40,769,291</i>	<i>70,220,409</i>	<i>110,989,700</i>
Peralatan										
1	Etalase	21 Feb 2001		II	25%	4,465,100	883,718	1,813,947	2,651,153	4,465,100
2	Mebel	21 Feb 2001		I	50%	660,000	192,500	467,500	192,500	660,000
3	Meja	21 Feb 2001	2	I	50%	280,000	81,667	198,333	81,667	280,000
4	Laser Jet	15 Mar 2001	1	II	25%	675,000	137,109	263,672	411,328	675,000
5	Meja	06 Apr 2001	1	I	50%	150,000	46,875	103,125	46,875	150,000
6	Rak dan CD	21 Jun 2001		II	25%	1,017,500	222,578	349,766	667,734	1,017,500
7	Modem	22 Jun 2001		II	25%	150,000	32,813	51,563	98,438	150,000
8	Etalase	28 Jun 2001		II	25%	500,000	109,375	171,875	328,125	500,000
9	Meja	24 Apr 2002		I	50%	3,300,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000	3,300,000
10	Etalase	01 Aug 2001		II	25%	700,000	156,771	229,688	470,313	700,000
11	Rak	01 Aug 2001		II	25%	500,000	111,979	164,063	335,938	500,000
12	Kursi	01 Aug 2001		I	50%	495,000	195,938	299,063	195,938	495,000
13	Printer LX-300	01 Aug 2001	1	II	25%	750,000	167,969	246,094	503,906	750,000
14	Meja	01 Aug 2001	2	I	50%	415,000	164,271	250,729	164,271	415,000
15	Monitor Second	01 Aug 2001		II	25%	350,000	78,385	114,844	235,156	350,000
16	CPU + Keybord	01 Aug 2001		II	25%	315,000	70,547	103,359	211,641	315,000
17	Kursi + Cleaner	16 Aug 2002		II	25%	505,000	42,083	42,083	462,917	505,000
18	Locker arsip	08 Oct 2002		II	25%	1,200,000	75,000	75,000	1,125,000	1,200,000
<i>Jumlah</i>						<i>16,427,600</i>	<i>3,869,577</i>	<i>6,044,702</i>	<i>10,382,898</i>	<i>16,427,600</i>

Lampiran

DAFTAR AKTIVA TETAP
Per 31 Desember
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tanggal Perolehan	Kwt	Klp	%	Cost	Depresiasi	Akm Depr 2002	Nilai Buku 31-Dec-02	Jumlah
	Perlengkapan									
1	Papan Nama	21 Feb 2001		I	50%	2,304,000	672,000	1,632,000	672,000	2,304,000
2	Kipas Angin, Blower	05 May 2001		II	25%	1,099,500	229,063	412,313	687,188	1,099,500
3	Kipas	01 Aug 2001		II	25%	75,000	16,797	24,609	50,391	75,000
4	Galon	01 Aug 2001		II	25%	30,000	6,719	9,844	20,156	30,000
5	Pangkon Air	01 Aug 2001		II	25%	50,000	11,198	16,406	33,594	50,000
6	Kompor	01 Aug 2001		II	25%	20,000	4,479	6,563	13,438	20,000
7	Kipas Angiin, phone	17 Dec 2002		II	25%	223,000	-	-	223,000	223,000
8	Kipas Angin	18 Dec 2002		II	25%	150,000	-	-	150,000	150,000
<i>Jumlah</i>						3,951,500	940,255	2,101,734	1,849,766	3,951,500
Jumlah						131,368,800	32,997,885	48,915,727	82,453,073	131,368,800

BAB V

PROFESIONALISME DALAM PENGAUDITAN

5.1 PROFESIONAL DAN STANDAR AUDITING

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 item standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Pengelompokan dari 10 item standar tersebut adalah standar umum terdiri dari 3 item standar, standar pekerjaan lapangan terdiri dari 3 item standar, dan standar pelaporan terdiri dari 4 item standar.

Standar yang mengatur persyaratan pribadi akuntan publik dikelompokkan dalam pernyataan standar auditing seksi standar umum yang terdiri dari: 1) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, 2) dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, dan 3) dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (IAI, SPAP, 2001:150.1).

Interpretasi IAI terhadap standar umum yang ke 3 tertuang dalam SA Seksi 230.1 yang menjelaskan bahwa penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Seorang auditor harus memiliki tingkat ketrampilan dan menggunakan ketrampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar yang tercermin pada perilaku profesional mereka agar diperoleh kualitas jasa yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang

ahli penilai, penaksir atau pengenalan barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.

5.2 PROFESIONAL DAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU

Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kementerian Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar yang relevan yang telah diterbitkan oleh Dewan dan Kementerian Akuntan Publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku.

Profesional merupakan salah satu elemen pokok yang penting di dalam penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu suatu kantor akuntan publik. Terdapat 9 elemen penting kewajiban KAP untuk membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yaitu : 1) independensi, 2) penugasan personel, 3) konsultasi, 4) supervisi, 5) pemekerjaan, 6) pengembangan profesional, 7) promosi, 8) penerimaan dan keberlanjutan klien, dan 9) inspeksi (IAI, SPAP, 2001:16000.1-5). Sedangkan Arens et. al (2003,36) mengelompokkan pengendalian mutu menjadi 5 elemen dan profesional merupakan elemen dari *personal management*.

Interprestasi pengembangan profesional adalah hal-hal yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan

profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan kepada personelnnya pengetahuan memadai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan unttuk kemajuan karier mereka di KAP.

5.3 PROFESIONAL DAN DIMENSINYA

Profesional adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan terhadap *knowledge*, *skill*, dan *character*. Seorang yang profesional akan mempunyai tingkat tertentu pada ketiga bidang tersebut (Bernardi, 1994). Arrunada (2000) mendefinisikan bahwa profesional merupakan perilaku untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, dirinya sendiri, peraturan, undang-undang yang berlaku dan masyarakat. Perilaku profesional diperlukan bagi semua profesi, agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat kepercayaan dari masyarakat (Bonner and Lewis, 1990). Profesional bagi akuntan publik adalah perilaku bertanggung jawab seorang *external auditors* atau *independent auditor* terhadap profesinya, peraturan, undang-undang, klien dan masyarakat termasuk para pemakai laporan keuangan.

Morrow dan Goetz (1988) mengungkapkan bahwa dimensi nyata dari profesionalisme seorang auditor independen adalah *Community affiliations*, *social obligation*, *self regulation*, *sense of calling*, dan *autonomy*. Konsep profesionalisme yang pertama kali dikemukakan oleh Hall (1968) banyak digunakan sebagai acuan oleh para peneliti lainnya. Konsep profesionalisme Hall digunakan untuk mengukur bagaimana para profesionalisme memandang profesi mereka, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Terdapat lima konsep profesionalisme Hall yaitu *community affiliation* (afiliasi komunitas), *autonomy demand* (kebutuhan untuk mandiri), *belief self regulation* (keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi), *dedication* (dedikasi pada profesi), dan *social obligation* (kewajiban sosial).

Kelima dimensi profesionalisme Hall tersebut mengungkapkan bahwa 1). profesionalisme dimensi afiliasi komunitas (*community affiliation*) menggunakan ikatan profesi sebagai acuan. Para profesional membangun kesadaran profesi melalui ikatan profesinya. 2). profesionalisme dimensi kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain diantaranya pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi. 3). profesionalisme dimensi keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi (*belief self regulation*) bermak-

sud bahwa seseorang yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 4). profesionalisme dimensi dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi. 5). profesionalisme dimensi kewajiban sosial (*social obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

5.4 PROFESIONAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Robbins (2001:22) menjelaskan bahwa semua sikap dan perilaku individual dibentuk oleh *personality* (kepribadian) dan pengalaman (*experiance*). Variabel *individual rank* (tingkat individual) yang dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam persepsi, pengambilan keputusan pribadi, pembelanjaan, dan motivasi adalah *biographical characteristics*, *ability*, *values* dan *attitudes*, *personality*, dan *emotions*. Hasil penelitian Goetz, et. al. (1991) menyimpulkan bahwa *individual rank* berpengaruh dengan beberapa dimensi profesionalisme.

Seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan oleh auditor pada saat menjalankan tugasnya (Libby and Frederick, 1990). Colbert (1989) mengungkapkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan *judgment* yang memiliki tingkat kekeliruan lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Pentingnya pengalaman bagi auditor independen dapat dilihat dari persyaratan profesional yang tercantum di SPAP (IAI, SPAP, 2001:110.2). IAI menjelaskan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Salah satu butir dari SK. Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, berisi penjelasan bahwa akuntan publik dapat menjalankan jasanya apabila memiliki pengalaman kerja di kantor akuntan publik lainnya minimal 2 tahun. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Ida Suraida (2003) bahwa ketepatan pemberian opini audit di-

pengaruhi oleh etika, kompetensi, pengalaman, risiko audit dan skeptisisme profesional auditor.

Seorang auditor independen dapat bekerja di KAP yang mempunyai *firm size* berbeda. *Firm size* merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan (Aaker, 1992). *Firm size* yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah total aktiva, penjualan, dan tenaga kerja. BPKP juga mengelompokkan KAP di Indonesia berdasarkan jumlah partner dan jumlah pemeriksa yang terdiri dari KAP Nasional besar, KAP Nasional menengah, dan KAP Nasional kecil yang tampak Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1 Pengelompokan Kantor Akuntan Publik

No.	<i>Firm Size</i>	Keterangan
1	KAP Nasional besar yang berafiliasi dengan KAP Internasional	jumlah partner lebih dari 5 dan jumlah pemeriksa lebih dari 100,
2	KAP Nasional besar	jumlah partner lebih dari 5 dan jumlah pemeriksa lebih dari 100,
3	KAP Nasional menengah	jumlah partner kurang dari 5 dan jumlah pemeriksa antara 50 sampai dengan 100
4	KAP Nasional kecil	jumlah partner kurang dari 5 dan jumlah pemeriksa minimal 3 sampai dengan 49 orang.

Sumber: Pedoman Evaluasi KAP/KJA: BPKP 1997.

Hubungan antara *firm size* dengan tingkat profesionalisme akuntan publik telah dibuktikan oleh penelitian Goetz, et. al. (1991) yang menyimpulkan bahwa *firm size* berhubungan dengan beberapa dimensi profesionalisme.

Kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak profesional oleh auditor independen bergantung pada kekuatan dari *suatu pengharapan* bahwa tindakan profesional tersebut akan diikuti oleh *output* tertentu dan daya tarik dari *output* tersebut bagi auditor independen tersebut (Vroom, 1964). Oleh karena itu profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai hasil kerja yang tinggi meliputi *job performance* (kinerja kerja), *job satisfaction* (kepuasan kerja), dan *organization commitment* (komitmen organisasi).

Kreitner and Kinicki (2001:155) menjelaskan bahwa kinerja tergantung pada kombinasi yang tepat antara usaha, kemampuan, dan ketrampilan. Sedangkan Blumberg dan Pringle (1982:565) menjelaskan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi interaksi antara kemampuan (meliputi kecerdasan dan ketrampilan) dan motivasi yang didukung oleh kesempatan un-

tuk berkinerja. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan bila ada suatu kecocokan yang tinggi antara kemampuan dan jabatan (Robbins, 2001:48).

Berdasarkan teori harapan tentang kinerja karyawan mengaplikasikan bahwa seorang auditor berharap mendapatkan kinerja kerja yang sesuai dengan tingkat penggunaan kemahiran profesionalnya. Penelitian Kalbers dan Fogarty (1995) menyimpulkan bahwa beberapa dimensi profesionalisme berhubungan dengan kinerja kerja seorang auditor.

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang merupakan selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan sekerja yang mendukung (Locke, 1976:1319). Holland menambahkan faktor tersebut yang dikenal dengan teori kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan. Holland menyimpulkan bahwa kecocokan yang tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan menghasilkan individu yang terpuaskan (Robbins, 2001:150).

Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan tugasnya secara profesional mengakibatkan ketidakpuasan dalam bekerja (Sorensen and Sorensen, 1974). Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Norries and Niebuhr (1984) yang menyimpulkan adanya hubungan positif antara profesionalisme dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi.

Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen dari sikap kerja yang menjelaskan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins, 2001:69). Komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak pada organisasi yang mempekerjakannya. Konstruksi dari komitmen organisasi yaitu memusatkan perhatian pada kesetiaan karyawan terhadap organisasi. Seseorang yang mempunyai tingkat profesionalisme lebih tinggi akan lebih berkomitmen terhadap organisasinya (Harrel et. al, 1986).

5.5 PROFESIONAL DALAM PENELITIAN UNIT OBSERVASI AKUNTAN PUBLIK

Penelitian terhadap konsep profesionalisme dalam akuntansi dan auditing telah banyak dilakukan baik di luar dan di dalam negeri. Penelitian profesionalisme yang mengambil objek akuntan publik telah dilakukan oleh Sorensen (1967), Schoeder and Imdieke (1977), Aranya, et. al. (1981), Norries and Neibuhr (1984), Aranya and Ferries (1984), Morrow and Goetz (1988), Goetz et. al. (1991), dan Schoroder et. al. (1991). Kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut terangkum pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Beberapa Penelitian Tentang Profesionalisme dan Hasil Kerja Individual (Unit Observasi Akuntan Publik)

Peneliti / Tahun	Faktor Yang Berpengaruh
Sorenson (1967)	Orientasi profesional berpengaruh terhadap kepuasan kerja, tingkat keluaran karyawan, dan orientasi organisasi
Schoeder and Imdieke (1977)	Profesionalisme berpengaruh terhadap kepuasan kerja
Aranya, Pollock and Amernic (1981)	Profesionalisme berpengaruh terhadap komitmen organisasi
Norries and Neibuhr (1984)	Beberapa dimensi profesionalisme berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja
Aranya and Ferries (1984)	Profesional berpengaruh terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan tingkat keluaran karyawan
Morrow and Goetz (1988)	<i>Community affiliations, social obligation, self regulation, sense of calling, dan autonomy</i> merupakan dimensi yang nyata dari profesionalisme
Goetz, Morrow, and Mc Elroy (1991)	<i>Individual rank dan firm size</i> berpengaruh terhadap beberapa dimensi profesionalisme
Schoroder, Reinstein, and Schwartz (1991)	Profesional berpengaruh terhadap komitmen organisasi

Sumber: Hasil penelitian dari Unit Observasi Akuntan Publik

5.6 PROFESIONAL DAN PERISTIWA-PERISTIWA YANG MERAGUKANNYA

Akhir-akhir ini masyarakat pengguna jasa akuntan publik mulai meragukan penggunaan kemahiran profesional seorang auditor dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan kualitas jasa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Faktor-faktor penyebab keraguan masyarakat terhadap profesi akuntan publik baik di dalam maupun diluar negeri adalah:

1. Bank-bank yang terkena likuidasi, dibekukan atau diambil alih oleh pemerintah ternyata banyak yang laporan keuangan terakhirnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari akuntan publik. Namun, tidak sampai satu tahun setelah opini WTP keluar, perusahaan yang dianggap *tidak bermasalah* ternyata menghadapi akhir hidupnya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan IMF dan masyarakat umum terhadap pemerintah maupun auditor domestik dalam menangani kasus perbankan.
2. Pada tahun 2001 halaman 6, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menjelaskan bahwa BPKP telah menelaah 38 kertas kerja auditor Bank Beku Kegiatan Usaha dan hasilnya terjadi pelanggaran terhadap standar pekerjaan lapangan sejumlah 9 KAP untuk poin tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu *account* dan standar pelaporan sejumlah 8 KAP untuk pengungkapan yang tidak memadai.
3. Penjelasan Baidarie (2000:480) tentang evaluasi BPKP atas 91 KAP/KJA: 1994-1997 yang menemukan tidak dipatuhinya SPAP (97,55%), tidak menerapkan sistem pengendalian mutu (81,27%), tidak memenuhi sepenuhnya kode etik (7,30%), dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (6,35%).
4. Penjelasan Ida Suraida (2003:2-3) tentang laporan Bank yang diaudit oleh KAP dengan pendapat *clean* setelah diperiksa lagi oleh BEPEKA ternyata hasilnya *disclaimer*, pernyataan Direktur TVRI yang akan mempercayakan audit TVRI kepada lembaga audit yang punya reputasi baik, sanksi yang diberikan oleh Bapepam terhadap KAP T&M sebagai akibat pemberian opini yang tidak tepat.
5. Kasus Enron–Arthur Anderson, World Com.–Arthur Anderson, Xerox dan Merck yang mengakibatkan KAP Arthur Anderson dijatuhi sanksi yang berat oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) dan *Securities Exchange Commission* (SEC).
6. Penjelasan Sukrisno Agoes (2003:6-8) tentang pelanggaran kode etik IAI yang diungkap oleh Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat IAI yang terinci pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Jenis Pelanggaran Terhadap Kode Etik IAI

No.	Periode	Jenis Pelanggaran
1.	1982-1986	Publikasi, pelanggaran objektivitas, isu pengawas intern holding mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut, hubungan rekan seprofesi, dan menerima klien yang ditolak KAP lain dengan perang tarif
2.	1986-1990	Publikasi, perubahan opini akuntan tanpa bukti pendukung

		kuat, opini WTP tanpa kertas kerja memadai, surat akuntan pengganti, membawa kertas kerja keluar KAP, wanprestasi pembayaran <i>fee</i> , dan pemegang saham minoritas mendukung KAP memihak
3.	1990-1994	21 kasus melibatkan 53 KAP dengan jumlah pengaduan dari instansi Pemerintah dan BUMN pemakai laporan (50%), perusahaan klien (30%), sisanya oleh KAP dan pengurus IAI

Sumber: Sukrisno Agoes (2003:6-8).

Penyebab utama kejadian-kejadian diatas adalah pelanggaran etika profesi dan standar audit oleh KAP yang menggiring posisi akuntan terutama akuntan publik dan auditor pada titik tertuduh. Hal ini mengakibatkan beberapa pengguna jasa audit meragukan keprofesionalismean seorang auditor KAP. Hal ini didukung oleh penelitian Sukrisno Agoes (2003) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pengguna laporan akuntan publik dipengaruhi oleh penerapan standar auditing, penerapan standar pengendalian mutu, dan kualitas jasa audit.

Jika ingin seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor senantiasa mematuhi standar dan berperilaku sesuai dengan kode etik, yang perlu diketahui adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku profesional auditor dan seberapa kuat pengaruhnya terhadap hasil kerja mereka. Robbins (2001:185) berpendapat bahwa perilaku profesional auditor termotivasi oleh harapan yang mereka ingin dapatkan baik untuk pribadi dan organisasi. Teori harapan (*ekspektasi*) dari Vroom (1964) berpendapat bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan dari *suatu pengharapan* bahwa tindakan itu akan diikuti oleh keluaran (*output*) tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu tersebut. Dengan kata lain teori harapan membantu menjelaskan mengapa banyak sekali auditor tidak termotivasi pada pekerjaan mereka dan semata-mata melakukan yang minimum untuk menyelamatkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A., *Strategic Market Management*, Third Edition, New York: John Wiley & Son, Inc. 1992.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), *AICPA Profesional Standard*, New York, NY:AICPA, 1995.
- Aranya, N., J. Pollock, and J. Amernic, *An Examination of Professional Commitment in Public Accounting*, Accounting, Organizations and Society 6, 1981.
- _____, N. and K.R. Ferris, *A Reexamination of Accountant Organizational–Professional Conflict*, The Accounting Review, 1984.
- Arens, Alvin A., Randal J Elder and Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*, 9th Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2003.
- Arrunada, B., *Audit Quality: Attribution, Private Safeguards and The Role of Regulation*, The European Accounting Review, Vol. 9, No. 2, 2000.
- Baidaie, M. Chatim, *Penerapan Kode Etik Profesi Ikatan Akuntan Indonesia*, Konvensi Nasional Akuntansi IV, IAI Jakarta, 5-7 September, 2000.
- Benardi, R., *Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*, Auditing: A Journal of Theory & Practice 13 (Suplement), 1994.
- Blumberg, M.,and C.D. Pringle, *The Missing Opportunity In Organizational Research: Some Implications for a Theory of Work Performance*, Academy of Management Review, October 1982.
- Bonner, S. and B. Lewis, *Dimensions of Auditors Expertise*, Journal of Accounting Research, Vol. 28 Supplement, 1990.
- BPKP, *Pedoman Evaluasi KAP/ KJA*, 1997.
- Colbert, J.L., *The Effect of Experience Auditor’s Judgements*, Journal of Accounting Literature 8.
- Goetz, J., P.C. Morrow, and J.C. Mc Elroy, *The Effect of Accounting Firm Size and Member Rank on Professionalism*, Accounting, Organizations and Society 16, 1991.
- Hall, R., *Profesionalization and Bureacratization*, American Sociological Review 33, 1968.
- Harrell, A., E Chewing, and M. Taylor. *Organization–Profession Conflict and The Job Satisfaction and Turnover Intentions of Internal Auditing*. A Journal of Practice & Theory (Spring), 1986.
- _____, M. Taylor and A Chewing, *An Examination of Managements Ability to Bias The Professional Objectivity of Internal Auditors*, Accounting, Organizations and Society 14 (3), 1989.

- Ida Suraida, *Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, Risiko Audit, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD (Tidak Dipublikasikan), 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, *Standar Profesional Akuntan Publik*, per 1 Januari 2001, Cetakan ke-1, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, per 1 Agustus 1994, cetakan ke-1, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Kalbers, L. P. and T.J Fogarty, *Professionalism and Its Consequences: A Study Internal Auditor*, *A Journal Practice and Theory* (Spring), 1995.
- Konrath, Laweey F, *Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach*, 5th Edition, West Publishing Company, 2002.
- Kreitner, Robert and Angelo Kinicki, *Organizational Behaviour*, Fifth Edition, The Mc Graw-Hill Companies, Inc, 2001.
- Libby, R. and D. Frederik, *Experience and The Ability to Explain Audit Findings*, *Journal of Accounting Research* Vol. 28 (2), 1990.
- Locke, E.A., *The Nature and Causes of Job Satisfaction*, dalam M.D. Dunnette. *Handbook of Industrial and Organizational Psychologi*, Chicago, Rand McNally, 1976.
- Morrow, P. C., and and J. F. Goetz, *Professionalism as A Form of Work Commitment*. *Journal of Vocational Behavior* 32, 1988.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing*, Edisi Kelima, PT. Salemba Empat, 1998.
- Norries, D., and R. Niebuhr, *Professionalism, Organizational Commitment and Job Satisfaction in An Accounting Organization*. *Accounting, Organizations and Society*, 1984.
- Robbins, Stephen P., *Organizational Behaviour*, 9th Edition, Prentice Hall Inc, 2001.
- _____, *Perilaku Organisasi*, Versi Bahasa Indonesia, Edisi Kedelapan, PT. Prenhallindo, Jakarta, Jilid 1, 2001.
- Schroeder, R., and L. Imdieke, *Local-Cosmopolitan and Bureaucratic Perception in Public Accounting Firms*. *Accounting, Organizations and Society* 2, 1977.
- _____, A. Reinstein and B. Schwartz, *Organizational Professional Commitment and Central Life Interests: A Firm Size and Level of Authority Analysis*, Unpublished Paper, 1991.
- Sorensen, J., *Professional and Bureaucratic Orientations in The Public Accounting Firm*, *Accounting Review* 42, 1967.
- _____, and T. Sorensen, *The Conflic of Professionals in Bureaucratic Organizations*, *Administrative Science Quarterly*, 1974.

Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Jilid 1 dan 2, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000

_____, *Pengaruh Penerapan Standar Auditing, Penerapan Standar Pengendalian Mutu, dan Kualitas Jasa Audit Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengguna Laporan Akuntan Publik*, Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD (Tidak Dipublikasikan), 2003.

Vroom, V.H, *Work and Motivation*, New York, 1964.

Whittington, O. Ray and Kurt Pany, *Principles of Auditing, and Other Assurance Services*, 13th Edition, Mc-Graw-Hill, Singapore, 2001.



Dra. SITI MARIA WARDAYATI, M.Si., Ak., lahir di Pamekasan, tanggal 5 Agustus 1966, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jurusan Akuntansi, pada tanggal 20 Desember 1990. Selain itu ia memperoleh gelar M.Si (Magister Science Indonesia) dari Program Pasca-sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung dengan bidang kajian utama Akuntansi di tahun 2000. Penulis sampai saat ini terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor di Program Pasca-sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Saat ini ia sebagai staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember. Pengalaman Auditor di peroleh dari KAP. Made Sudarma, dan Rekan, KJA Soca Baskara, dan saat ini bergabung di KAP. Wartono, dan Rekan. Selain itu ia menjadi konsultan di Lembaga Pendidikan Akuntansi Manajemen PRATHAMA JEMBER serta sebagai ketua Perhimpunan Insan Akuntansi periode 2004 – 2008.